

PENGARUH PAD, DAU, DBH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PDRB DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JOMBANG

Yuliasnita Verlandes¹, Nurdiana Fitri Isnaini², Nersiwad³, Agoes Hadi Purnomo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Majapahit

Email: yuliasnitaverlandes@unim.ac.id, diana.fe@unim.ac.id, nersiwad@unim.ac.id, ahp@unim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang selama periode 2014-2020. Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), penelitian ini menemukan bahwa secara simultan, variabel PAD, DAU, DBH, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan. Namun, secara parsial, PAD terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DAU, DBH, dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Untuk tingkat kemiskinan, hasil menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan, meskipun PAD, DBH, dan belanja modal cenderung mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah Jombang mengoptimalkan PAD dan penggunaan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: PAD, DAU, DBH, belanja modal, PDRB, kemiskinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), and capital expenditure on economic growth and poverty level in Jombang Regency during the 2014-2020 period. Using multiple linear regression analysis methods with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance (DJPK), this study found that simultaneously, the variables PAD, DAU, DBH, and capital expenditure did not have a significant effect on GDP and poverty levels. However, partially, PAD has been shown to have a significant positive influence on economic growth, while DAU, DBH, and capital expenditure do not show a significant influence. For poverty levels, the results show that no independent variables have a significant effect, although PAD, DBH, and capital expenditure tend to reduce poverty rates. This study suggests that the Jombang local government optimize PAD and the use of budgets for programs that have a direct impact on the community to increase economic growth and reduce poverty.

Keywords: PAD, DAU, DBH, capital expenditure, GDP, poverty.

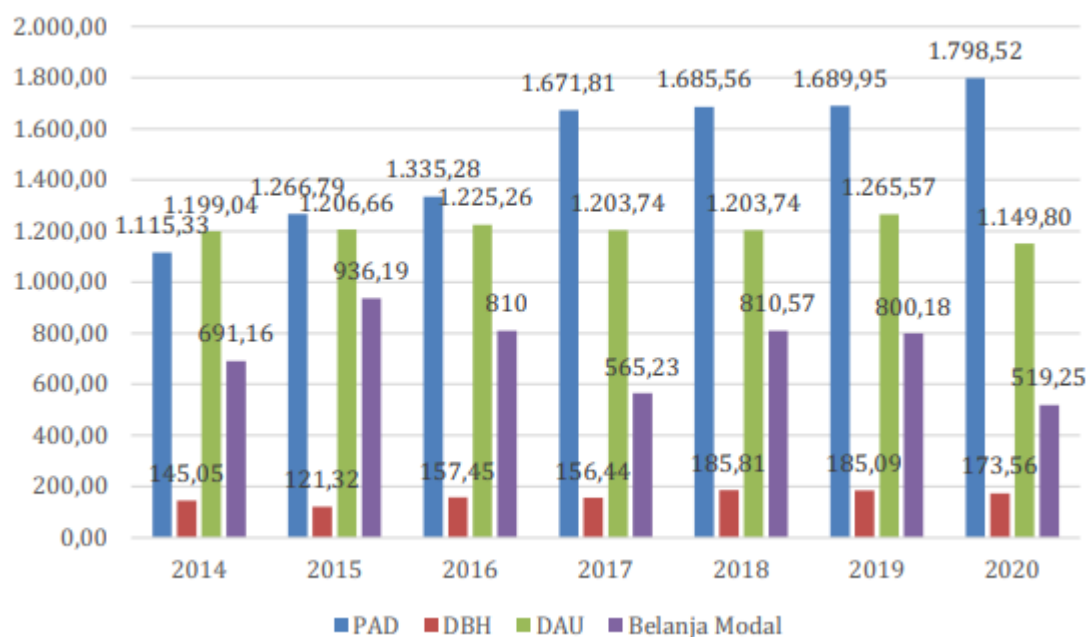
PENDAHULUAN

Praktik otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Uliansyah, 2021). Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya secara lebih mandiri, termasuk dalam mengelola belanja daerah dan menatausahakan pendapatan daerah.

Implementasi otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dengan konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan sebagai sumber pendanaan atas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah (Uliansyah, 2021). Christia & Ispriyarso (2019) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi ekonominya di daerahnya untuk menyelesaikan masalah di daerah. Dengan kata lain, dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan agenda prioritas daerah.

Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan pendapatan lainnya. Kebijakan desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan dan memungut PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Di sisi lain TKDD yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Dana menjadi sumber pendanaan untuk mempercepat Pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik (Christis & Ispriyarso, 2019)

Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, khususnya dalam Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan komponen belanja modal dalam menyediakan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana akan menstimulus laju pertumbuhan ekonomi (Risqiyah & Yunani, 2022). Selain itu, pendapatan daerah, baik dari komponen PAD maupun TKDD harus dimanfaatkan secara tepat sehingga dapat membiayai operasional pemerintahan dalam menjalankan roda perekonomian daerah.



Grafik 1. Realisasi PAD, DBH, DAU dan Belanja Modal Kabupaten Jombang 2020 – 2024

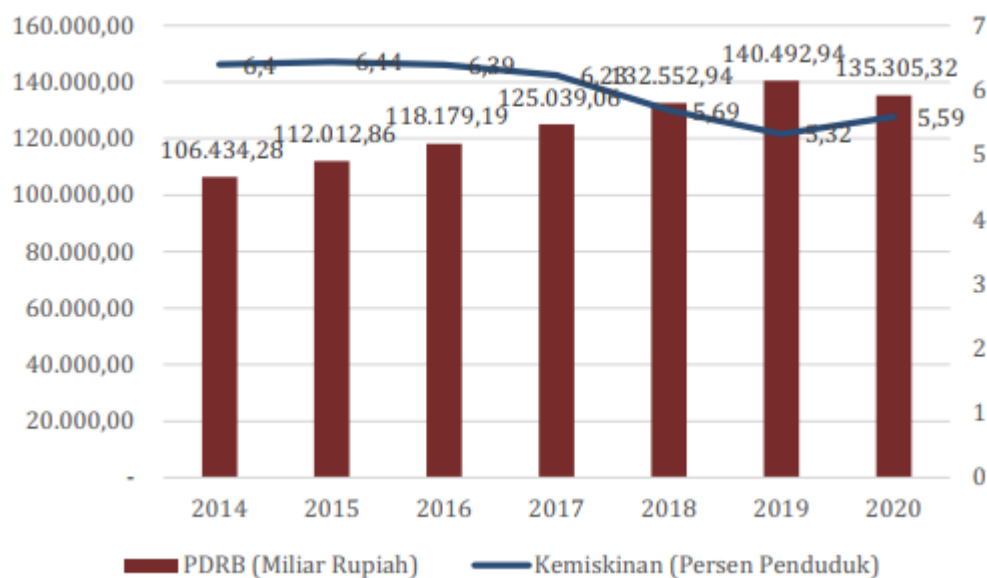
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Kembali

Tabel 1. Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Jombang Tahun 2020 – 2024

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	798,97	815,01	740,48	911,48	864,95	1.016,47	1.311,37
Realisasi	691,16	936,19	810	565,23	810,57	800,18	519,25
Serapan	86,51%	114,87%	109,39%	62,01%	93,71%	78,72%	39,60%

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Kembali

Seperti dalam Gambar 1, PAD Kabupaten Jombang menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan dari tahun 2014-2020 sedangkan komponen DBH dan DAU yang terbilang tinggi. Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki realisasi belanja modal yang relative rendah. Dilihat dari Tabel 1, serapan belanja modal mencapai lebih dari 100% hanya di tahun 2015 dan 2016. Di tahun yang lain, realisasi belanja modal tidak mencapai target yang telah dianggarkan dalam APBD. Berkaca dari pendapat Sari et al. (2018) dan Rahmawati & Ishak (2020), rendahnya penyerapan menunjukkan *value for money* APBD sehingga dapat menghambat pergerakan roda ekonomi dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. PDRB dan Presentase Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2020

Sumber : BPS Kabupaten Jombang, Diolah Kembali

Terlepas dari realisasi belanja modal yang relative kecil terhadap PAD, DBH dan DAU pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang yang tercermin dari PDRB memiliki tren positif dari tahun seperti dalam Gambar 2. Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan di Kabupaten Jombang juga berangsur-angsur turun dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Namun, di tahun 2020 efek pandemi covid 19 berjhasil menyebabkan PDRB sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya dan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,27% di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan seberapa besar dampak PAD, DBH, DAU dan belanja modal pemerintah Kabupaten Jombang daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Metode analisis regresi linier akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menghadirkan wawasan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam merumuskan kebijakan atas pengelolaan PAD, DBH, DAU dan belanja modal Kabupaten Jombang.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terdapat peningkatan produksi barang dan jasa (Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Maulana & Masbar, 2018, dan Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan menjadi lebih baik seiring dengan peningkatan PDRB. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh setidaknya 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi (Jhingan M., 2012 dalam Risqiyah & Yunani, 2022). Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, modal, tata Kelola organisasi, kapasitas dan skala produksi dan budaya kerja. Di sisi lain, faktor non ekonomi mencakup faktor sosial dan budaya, sumber daya manusia, politik dan administrasi serta birokrasi.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang kekurangan sumber daya, baik berupa uang maupun barang, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjamin keberlangsungan hidupnya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep basic needs approach dimana masyarakat miskin diukur dari rata-rata pengeluaran per bulan per kapita di bawah garis kemiskinan (Ningrum & Nuryadin, 2021). Menurut Alviannor & Hahrati (2021), kemiskinan dapat disebabkan karena rendahnya tingkat Pendidikan, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap tindak kriminal dan ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan hidup sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di suatu daerah. PAD bersumber dari pungutan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah (Kurniawati & Muzdalifah, 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal (Sulaeman & Silvia, 2019). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk dapat menggali

dan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari potensi daerah masing-masing

Dana Alokasi Umum

Cristia & Ispriyarso mengungkapkan bahwa DAU atau Dana Alokasi Umum merupakan instrument desentralisasi fiskal untuk pemerataan fiskal. Dengan kata lain, DAU merupakan alat yang digunakan pemerintah pusat untuk menangani ketimpangan i=fiskal yang terjadi antar pemerintah daerah. Besaran DAU ditetapkan berdasarkan celah keuangan (Adriawan et al, 2022) atau kebutuhan moneter yang belum mampu di tutup dengan keuangan daerah secara mandiri.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil pendapatan yang masuk ke dalam rekening pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH dibagikan berdasarkan persentase tertentu kepada daerah penghasil untuk mengurangi eksternalitas negative atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. DBH tersusun dari 2 sumber yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (Megasari & Wahidahwati, 2022).

Penggunaan DBH tidak memiliki syarat tertentu dalam penggunaannya (Sulaeman & Silvia, 2019) sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan DBH ke dalam pos-pos pengeluaran daerah secara bebas. Namun, Retno & Widiatmoko (2019) berpendaoat bahwa DBH seharusnya dapat digunakan sesuai dengan agenda pemerintah daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya pelayanan publik.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah di samping belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk

oembelian atau Pembangunan asset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal juga digunakan untuk investasi Pembangunan (Kurniawati & Muzdalifah, 2022)

Sebagian besar penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat didanani dengan anggaran belanja modal pemerintah. Belanja modal berperan penting dalam pemberian pelayanan public oleh pemerintah (Retno & Widiatmoko, 2019) dan dalam pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor (Novitasai 2019). Dana belanja modal dapat berasal dari PAD maupun komponen TKDD.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi literatur, beberapa peneliti terdahulu telah menemukan dampak PAD, DAU, DBH dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan walaupun secara terpisah

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Kurniawati & Muzdalifah (2022) menemukan bahwa PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian Sulaeman & Silvia (2019) juga mengungkapkan bahwa ekonomu regional di Indonesia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan PAD, DAU dan DBH. Kontra dengan temuan Kurniawati & Muzdalifah, Penelitian Retno & Widiatmoko (2019) di Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali menyimpulkan bahwa pengeluaran belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan kemiskinan, penelitian Syamsul (2020) yang dilakukan pada 33 pemerintah provinsi di Indonesia menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sedikit berbeda, Adriawan et al (2022) menemukan bahwa PAD di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan sedangkan alokasi DAU berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian yang lain, Isramiwarti, Rasuli & Taufik (2017) mendapatkan hasil bahwa komponen PAD, DBH dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk

miskin sedangkan DAU memiliki pengaruh yang tidak cukup signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PAD, DAU, DBH dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dapat dilihat di situs resmi pemerintah. Data pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan peneliti dapatkan dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang sedangkan data realisasi PAD, DAU, DBH dan belanja modal Kabupaten Jombang didapatkan dari situs portal data direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Teknik Analisis

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen (Risqiyah & Yunani, 2022). Dengan kata lain, aplikasi metode regresi linier berganda ditunjukkan untuk menjelaskan kasualitas variabel PAD, DAU, DBH dan Belanja Modal terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan. Sebagaimana dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan merupakan variabel dependen atau terkait dalam penelitian ini. PAD, DAU, DBH dan belanja modal pemerintah daerah berperan sebagai variabel bebas atau dependen. Dengan adanya 2 variabel terkait, penelitian ini menggunakan dua pendekatan model regresi linier berganda. Analisis dampak PAD, DAU, DBH dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam model berikut :

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + \beta_4 BM + \varepsilon$$

Dampak variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan disajikan dengan pendekatan model sebagai berikut :

$$TK = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + \beta_4 BM + \varepsilon$$

Dimana, variabel PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah); PAD = Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah); DAU = Dana Alokasi Umum (miliar rupiah); DBH = Dana Bagi Hasil (miliar rupiah); BM = belanja modal pemerintah daerah (miliar rupiah); β_0 = konstanta (intercept); $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi dan ε = error

HASIL DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	PDRB (Miliar Rupiah)	Kemiskinan (Persentase)	PAD (Miliar Rupiah)	DAU (Miliar Rupiah)	DBH (Miliar Rupiah)	Belanja Modal (Miliar Rupiah)
Mean	124.288,08	6,01	1.509,03	1.207,69	160,67	733,23
Maximum	140.492,94	6,44	1.798,52	1.265,57	185,81	936,19
Minimum	106.434,28	5,32	1.115,33	1.149,80	121,32	519,25

Sumber: Data diolah

Tabel 2 menunjukkan PDRB tertinggi Kabupaten Jombang berada di tahun 2019, yaitu sebesar 140.492 miliar rupiah. Rata rata belanja modal Kabupaten Jombang dalam rentang waktu penelitian adalah sebesar 733,23 miliar rupiah. Dari segi komponen pendapatan daerah rerata PAD, DAU dan BPH adalah 1.509,03 miliar rupiah, 1.207,69 miliar rupiah dan 160,67 miliar rupiah.

Hasil Regresi

Berdasarkan olahan data lewat program SPSS hasil regresi linier berganda disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Variabel Independen: PDRB			
Konstanta	-43.295,805	-0,498	0,668
PAD	48,140	4,976	0,038
DAU	0,003	0,081	0,943
DBH	74,387	0,931	0,450
BM	6,863	0,337	0,768
R2	0,942		
F-statistic	8,154		
F-statistic (Prob)	0,112		
Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan			
Konstanta	11,981	1,790	0,215
PAD	-0,0014	-1,937	0,192
DAU	0,0000015	0,516	0,657
DBH	-0,003	-0,486	0,675
BM	-0,0003	-0,192	0,865
R2	0,863		
F-statistic	1,456		
F-statistic (Prob)	0,446		

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Berdasarkan perhitungan Tabel 3 hubungan variabel bebas berupa PAD, DAU, DBH dan belanja modal terhadap PDRB dirumuskan lewat persamaan (1) sedangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel TK diformulakan dalam persamaan (2) sebagaimana berikut :

$$PDRB = -43.295,805 + 48,14 PAD + 0,003 DAU + 74,387 DBH + 6,843 BM \quad (1)$$

$$TK = 11,981 - 0,0014 PAD + 0,0000015 DAU - 0,003 DBH - 0,0003 BM \quad (2)$$

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, persamaan (1) dapat disebut dengan model pertumbuhan ekonomi dan persamaan (2) dapat disebut dengan model tingkat kemiskinan

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dalam variabel R^2 dalam Tabel 3. Untuk model pertumbuhan ekonomi, nilai R^2 sebesar 0,942 berarti bahwa 94,2% pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah. Di sisi lain, R^2 model tingkat kemiskinan sebesar 0,863 berarti bahwa 86,3% tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada. Dengan kata lain, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar persamaan—faktor lain menjelaskan 5,8% model pertumbuhan ekonomi dan 13,7% model tingkat kemiskinan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic atau tingkat probabilitas F-statistic. Nilai probabilitas F di bawah 0,05 ($\alpha=5$) menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Seperti dalam Tabel 3, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,112 dalam model pertumbuhan ekonomi berarti bahwa variabel PAD, DAU, DBH, dan BM secara simultan tidak berpengaruh terhadap PDRB. Di sisi lain, probabilitas F-statistic model tingkat kemiskinan (0,446) turut menunjukkan tidak berpengaruhnya variabel-variabel bebas dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t statistik) dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel independen dalam Tabel 3. Uji parsial menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat secara individual.

Hasil regresi untuk pertumbuhan ekonomi menunjukkan hanya variabel PAD yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas kurang dari α ($0,038 < 0,05$). Variabel bebas lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05—signifikansi DAU=0,943, DBH=0,450, dan BM=0,768.

Dalam model tingkat kemiskinan, keseluruhan variabel PAD, DAU, DBH, dan BM tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi (probabilitas) setiap variabel bebas yang lebih besar dari 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum menginterpretasikan model persamaan regresi lebih lanjut, model penelitian haruslah dinyatakan lulus dari asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Model Persamaan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Model Pertumbuhan Ekonomi	0,200
Model Tingkat Kemiskinan	0,200

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Deteksi normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov. Tabel 4 menunjukkan bahwa kedua model persamaan memiliki signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi di atas 0,05 berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, uji normalitas terpenuhi.

Tabel 5. Deteksi Multikolinieritas

Variable	Tolerance	VIF	Keterangan
Model Pertumbuhan Ekonomi			
PAD	0,708	1,412	Lulus
DAU	0,880	1,136	Lulus
DBH	0,610	1,639	Lulus
BM	0,501	1,997	Lulus
Model Tingkat Kemiskinan			
PAD	0,708	1,412	Lulus

DAU	0,880	1,136	Lulus
DBH	0,610	1,639	Lulus
BM	0,501	1,997	Lulus

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Tabel 5 menunjukkan statistik multikolinieritas yang didapatkan dalam hasil regresi linier. Suatu variabel dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas apabila memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan memiliki VIR kurang dari 10. Dengan demikian, variabel independen dalam model regresi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dapat dinyatakan lulus dari uji multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Model Persamaan	t	Sig.
Model Pertumbuhan Ekonomi		
PAD	-0,251	0,825
DAU	-1,155	0,368
DBH	0,932	0,450
BM	-1,561	0,259
Model Tingkat Kemiskinan		
PAD	-0,459	0,691
DAU	-1,135	0,374
DBH	0,819	0,499
BM	-1,378	0,302

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Pembuktian indikasi heteroskedastisitas dalam model dilakukan dengan uji glejser— meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Dengan nilai signifikansi variabel PAD, DAU, DBH, dan BM dalam kedua model sebagaimana

terlihat dalam Tabel 6, gejala heteroskedastisitas tidak terjadi di dalam kedua model regresi linier.

Tabel 7. Hasil *Run Test*

Model Persamaan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Model Pertumbuhan Ekonomi	0,952
Model Tingkat Kemiskinan	0,431

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Selanjutnya, gejala autokorelasi dibuktikan dengan *Run Test*. Melihat Tabel 7, model pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi sebesar 0,952 sedangkan signifikansi model tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,431. Signifikansi di atas 0,05 menandakan bahwa gejala autokorelasi tidak terjadi.

Analisis Dampak PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan, koefisien variabel independen menunjukkan porsi peran setiap variabel independen terhadap variabel terikat. Efek variabel PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel 3 atau persamaan (1). Nilai koefisien PAD (β_1) adalah sebesar 48,14; koefisien DAU (β_2) = 0,003; koefisien DBH (β_3) = 74,387; dan koefisien belanja modal (β_4) = 6,843.

Berdasarkan hasil analisis model pertumbuhan ekonomi, dampak setiap variabel bebas terhadap PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel PAD berpengaruh positif dalam meningkatkan PDRB. Koefisien PAD (β_1) yang bernilai 48,14 dapat ditafsirkan bahwa setiap kenaikan PAD satu satuan akan meningkatkan PDRB sebesar 48,14 satuan;
2. Setiap kenaikan DAU sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0,003 miliar rupiah atau sebesar 3 juta rupiah;
3. Dalam model ini, DBH memiliki dampak paling besar di antara variabel bebas lain. β_3 sebesar 74,387 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 miliar DBH akan menyumbang 74,387 miliar rupiah ke PDRB; dan

4. Sama seperti variabel bebas lain, belanja modal pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki koefisien sebesar 6,843 yang berarti bahwa setiap tambahan 1 satuan belanja modal akan meningkatkan PDRB sebesar 6,843 satuan juga.

Analisis Dampak PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Sama halnya dengan subbagian sebelumnya, analisis dampak PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat lewat koefisien variabel independen. Hasil regresi untuk model tingkat kemiskinan menunjukkan koefisien setiap variabel, yaitu $\beta_1 = -0,0014$; $\beta_2 = 0,0000015$; $\beta_3 = -0,003$; dan $\beta_4 = -0,0003$. Selain itu, konstanta sebesar 11,981 menunjukkan persentase rakyat miskin sebesar 11,981% jika tidak ada alokasi PAD, DAU, DBH, dan belanja modal—setiap variabel independen bernilai 0.

Dilihat dari koefisien setiap variabel, 3 dari 4 variabel independen, yaitu PAD, DBH, dan belanja modal, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap penambahan PAD, DBH, dan belanja modal akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang. Lebih jauh lagi, dampak variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap kenaikan PAD 1 miliar akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0,0014 persen;
2. Berbeda dengan variabel lain, DAU memberikan dampak positif dalam meningkatkan tingkat kemiskinan. Pertambahan DAU setiap satu satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0000015 satuan;
3. Melihat nilai β_3 , pengaruh DBH dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,003. Hal tersebut berarti bahwa setiap satuan DBH akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,003 persen; dan
4. Belanja modal memiliki dampak negatif sebesar -0,0003 terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyadari beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2014 hingga 2020. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan empat variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal pemerintah daerah sehingga kurang dapat menunjukkan realita yang sesungguhnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa (1) PAD, DAU, DBH, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB maupun tingkat kemiskinan, (2) PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh positif secara tidak signifikan, dan (3) secara parsial, tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan meskipun PAD, DBH, dan belanja modal mendorong penurunan tingkat kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong dan memaksimalkan potensi daerah. Selain itu, penggunaan PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan anggaran belanja modal harus lebih dimaksimalkan manfaatnya sehingga dapat mencapai *value for money* yang berimplikasi dalam peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, sumber penerimaan (PAD, DAU, dan DBH) dapat fokuskan untuk pendanaan belanja yang memiliki implikasi langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, program pembinaan UMKM, program investasi pembangunan manusia, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 226–234.
- Alviannor, & Fahrati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 75–87.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011 SD 2015. *PEKBIS*, 9(3), 195–213.
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Maulana, I., & Masbar, R. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(1), 80–88.
- Megasari, S., & Wahidahwati. (2022). Pengaruh PAD, DBH, dan DAK terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Ningrum, E. W., & Nuryadin, M. R. (2021). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 113–126.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174–186.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Retno, N. D., & Widiatmoko, J. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 23–35.
- Risqiyah, W., & Yunani, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 68–80.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 38–43.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112.
- Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1), 140–147.

Uliansyah, B. A. A. (2021). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. In *APBN IN DEPTH: MENGULIK APBN LEBIH DALAM* (pp. 60–75). Politeknik Keuangan Negara STAN.